



---

## **Dinamika Politik Partai Lokal dan Nasional Pada Pemilukada di Aceh, Tahun 2017**

**Muhammad Nur<sup>\*1</sup>, Usman<sup>1</sup>, Irwan safwadi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

<sup>2</sup>Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

\*Email korespondensi: [\\_muhammadnur19@gmail.com](mailto:_muhammadnur19@gmail.com) <sup>1</sup>

---

Diterima 12 September 2018; Disetujui 25 Oktober 2018; Dipublikasi 31 Oktober 2018

**Abstract:** *This study aims to find out the political dynamics of regional and national parties in Aceh's regional election 2017. This study is also aimed to investigate the factors that influence the political dynamics of that particular regional election. The political dynamics in Aceh is very fluctuated. This fluctuation may be caused by the escalation of lobbying done by the political parties that has dominant influence. However, this domination seems to change from time to time particularly in certain districts. In Bireun district for example, the figures from certain national parties had been acknowledged by the local community in the previous regional election in 2017. This change was not only occurred in the executive level but also in the composition of legislative members in the regional election as seen in 2014 elections'. This study used the qualitative descriptive method. The data was collected mainly from words, sentences or images that have insight meaning and trigger more tangible understanding than numbers or frequencies. The data was gathered from interview and observation in Banda Aceh. As for qualitative research, the data collection was carried out in the natural setting. The primary data source and data collection technique were more focus on the observation, in-depth interview and also documentation. The result showed that the dynamics of political development between regional and national parties were very dynamic. This dynamic was influenced by the fundamental aspect in politics, that is the interest of the party. The study suggested that the interest between regional and national parties at the district and provincial level have different degree of interest. However, in order to get the seat in the national parliament, these parties might be engaged in a political compromise. On the other hand, the political dynamics between regional and national parties lies in the party ideology itself.*

**Keywords:** *politics, political party, regional election, Aceh*

**Abstrak:** Penelitian ini berjudul; dinamika politik partai lokal dan partai nasional dalam pemilukada di Aceh, tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi dinamika politik partai lokal dan nasional pada pemilukada di Aceh, tahun 2017, dan mengetahui bagaimana pengaruh dinamika politik partai lokal dan nasional pada pemilukada di Aceh, tahun 2017. Dalam perkembangannya dinamika politik di Aceh naik turun, hal ini dipengaruhi oleh eskalasi partai politik dalam melakukan lobi-lobi politik, sebagaimana kita ketahui partai lokal memiliki pengaruh dominan di Aceh sampai dengan saat ini, akan tetapi dominasi ini semakin terasa berkurang seiring dengan perkembangan waktu, di beberapa daerah, misalnya seperti kabupaten Bireun tokoh-tokoh dari partai nasional mulai diterima masyarakat setempat dalam pemilihan kepala daerah di tahun 2017, perubahan-perubahan ini tidak hanya terjadi pada tingkatan eksekutif akan tetapi komposisi anggota legislatifpun ikut berubah sebagaimana terlihat dari hasil pileg tahun 2014 yang lalu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih bermakna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar sajian angka atau frekuensi, teknik pengolahan datanya adalah melalui metode wawancara dan observasi lapangan selama di Aceh. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada tahap kondisi alamiah (*natural setting*), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak kepada observasi mendalam (*participatory observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika perkembangan politik antara parlok dan parnas memiliki dinamika yang cukup dinamis. Dinamika ini sangat dipengaruhi oleh hal yang mendasar dalam politik yaitu kepentingan. Antara parlok dan parnas ditingkat kabupaten kota dan provinsi memiliki kepentingan yang berbeda. Sementara untuk meraih kursi DPR-RI parlok dan parnas bisa di pertemukan dalam suatu kompromi politik. disisi lain dinamika antara parlok dan parnas ada pada tatanan ideologi kepartaian.

**Kata kunci : Politik, Partai Politik, Pemilu, Aceh**

Dinamika dalam sebuah kelompok biasanya sering ditentukan oleh orang-orang berpengaruh didalamnya, dinamika juga dapat diartikan sebagai suatu pergerakan yang mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, gerak politik dapat saja terjadi diberbagai daerah di Indonesia, termasuk didalamnya Aceh. Dinamika politik tidak hanya terjadi pada tingkatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota saja, akan tetapi dinamika politik jauh melebihi itu termasuk didalamnya perkembangan partai politik itu sendiri. Partai politik memiliki peranan penting dalam menggerakkan mesin politik, baik dalam menyukseskan pemilu ditingkat legislatif maupun eksekutif.

Dalam pemilu legislatif misalnya kita akan melihat bagaimana peranan dan perkembangan partai politik dalam mempengaruhi dan mempertahankan basis massanya. Partai politik memiliki peranan penting dalam mewujudkan perubahan perubahan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita politiknya. Salah satu perubahan nyata yang dicita-citakan partai adalah pemenuhan tingkat kesejahteraan anggota, kelompok maupun warga negara. Tentunya, kesejahteraan ini dapat

diwujudkan apabila partai tersebut mampu menjalankan fungsinya secara lebih baik dan terbuka, diantara beberapa fungsi partai politik menurut Ramlan Subakti adalah fungsi rekrutmen, fungsi sosialisasi, fungsi partisipasi, fungsi komunikasi, fungsi pengendalian konflik, fungsi pemandu kepentingan dan fungsi kontrol politik.

Sesuai dengan fungsi- fungsi politik tersebut diatas, maka sebuah partai politik dapat bertahan lama apabila fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan secara lebih baik, begitu juga sebaliknya, sebuah partai politik dapat bubar apabila fungsi-fungsi tersebut tidak dikelola secara lebih baik dan terbuka, hal ini terlihat dari beberapa partai politik di Aceh, khususnya partai politik lokal. Untuk itu, mari sama- sama kita melihat bagaimana perkembangan parlok di aceh dari tahun ke tahun, dari wacana awal sejak masa pembentukan, perkembangan partai politik lokal di Aceh sangat banyak, tercatat sebanyak dua puluh bakal calon partai politik lokal mencuat kepermukaan untuk mewarnai perpolitikan Aceh pasca damai MoU Helsinki dengan logo dan warna benderanya masing-masing, diantara partai lokal yang ikut mewarnai Aceh adalah Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh Aman Sejahtera

(PAAS), Partai Aceh Lauser Antara (PALA), Partai Pemersatu Muslem Aceh (PPMA), Partai Generasi Aceh Beusabo Thaat dan Taqwa (Gabthat), Partai Aliansi Rakyat Aceh (PARA) Peduli Perempuan, Partai GAM atau PA sekarang, Partai Serambi Persada Nusantara Serikat, (PSPNS), Partai Bersatu Atjeh (PBA), Partai Demokrat Aceh (PDA), Partai SIRA, Partai Darussalam (PD), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aceh Meudaulat (PAM), Partai Nurani Aneuk Naggroe Aceh (NUANA), Partai Nahdhatul Ummah (PNU), Partai Silaturrahmi Rakyat Aceh (PSRA), Partai Demokrasi Aneuk Naggroe (PADAN), dan Partai Islam Aneuk Naggroe (PIA).

Akan tetapi, dari 20 parlok tersebut, hanya 14 parlok yang kemudian berhasil mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, selebihnya tidak mencukupi syarat karena tidak memiliki kepengurusan yang lengkap dan surat dokumen pendirian partai, sehingga partai-partai tersebut dinyatakan gugur. Untuk proses selanjutnya, ke 14 parlok tersebut harus melewati verifikasi tahap selanjutnya di Kemenkumham, dari hasil pemeriksaan administrasi sebanyak 12 parlok yang dinyatakan lulus karena memenuhi syarat serta memiliki kepengurusan yang lengkap, sebanyak 50 % ditingkat Kabupaten Kota, dan 25 % ditingkat Kecamatan, sedangkan dua parlok lainnya dinyatakan gugur. Kemudian untuk selanjutnya, parlok-parlok tersebut harus mendaftar lagi ke kantor KIP Aceh untuk verifikasi faktual tahap selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi terakhir, pada tanggal 7 Juli 2008, ketua KIP Aceh, Salam Poroh, melalui Surat Keputusan, 05/SK/ KIP/ 2008 mengumumkan hanya enam parlok yang

dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk bisa ikut pemilu pada di Aceh pada tahun 2009 yang akan datang. Partai-partai lokal yang dinyatakan lewat verifikasi tersebut adalah Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Daulat Aceh, Partai SIRA, Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh, Partai Bersatu Atjeh. Kemudian, lebih lanjutnya lagi, dari hasil pelaksanaan pemilu pada tahun 2009, Partai Aceh (PA) dinyatakan sebagai partai pemenang pemilu dengan perolehan suara terbanyak di DPR Aceh dengan perolehan kursi sebanyak 33 kursi di DPR Aceh dari total keseluruhan kursi sebanyak 69 kursi, sedangkan untuk partai lokal lainnya hanya Partai Daulat Aceh (PDA) yang mampu mempertahankan 1 kursi, selebihnya 35 kursi lainnya direbut oleh partai nasional, diantaranya Partai Demokrat sebanyak 10 kursi, Partai Golkar 8 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 4 kursi, Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3 kursi, sementara 1 kursi untuk masing masing partai, diantaranya Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Untuk selanjutnya, dalam pemilu tahun 2014, partai-partai lokal ini mengalami perubahan lagi, perubahan ini dikarenakan aturan pemilu yang diatur dalam undang-undang UUPA nomor 11 tahun 2006 dan qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 tentang partai politik lokal, berdasarkan aturan ini, partai peserta pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya 5 persen dari jumlah kursi di DRR Aceh atau memperoleh sekurang-kurangnya 5 persen dari jumlah kursi di DRRK yang sekurang-kurangnya di 1/ 2 jumlah Kabupaten/ Kota di Aceh.

Akibat aturan ini, Partai Daulat Aceh akhirnya harus mengubah nama menjadi Partai Damai Aceh (PDA), perubahan ini hanya semata-mata untuk bisa ikut serta dalam pemilu pada tahun 2014.

Keberadaan Partai Damai Aceh dalam pemilu tahun 2014 hanya mampu mempertahankan 1 kursi dengan perolehan suara sebanyak 1, 23 %. Selain PDA, dalam pemilu tahun 2014, muncul partai lokal baru lainnya yaitu Partai Nasional Aceh (PNA). Partai ini didirikan oleh Mantan Gubernur Aceh, yaitu Irwandi Yusuf. Partai berwarna orange ini hanya mampu mempertahankan 3 kursi di DPR Aceh dengan perolehan suara sebanyak 3, 70 %, Sementara Partai Nasdem sebanyak 8 kursi dengan perolehan suara 9, 88%, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 kursi dengan perolehan suara sebanyak 1, 23 %, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 kursi dengan perolehan suara 4, 94 %, Partai Golkar sebanyak 9 kursi dengan perolehan suara sebanyak 11, 11 %, Gerindra sebanyak 3 kursi dengan perolehan suara sebanyak 3,70 %, Demokrat sebanyak 8 kursi dengan perolehan suara sebanyak 9, 88 %, PAN sebanyak 7 kursi dengan perolehan suara sebanyak 8, 64 %, PPP sebanyak 6 kursi dengan perolehan suara sebanyak 7, 41 %, Partai Aceh 29 kursi dengan perolehan suara sebanyak 35,80 %, Partai Bulan Bintang sebanyak 1 kursi dengan perolehan suara 1,23 %, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebanyak 1 kursi dengan perolehan suara 1, 23 %, sedangkan untuk partai PDI-P dan Hanura 0 %.

Dari ulasan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2014 telah terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait

perkembangan partai politik baik lokal maupun nasional di Aceh, baik secara kuantitas maupun secara kualitas partai. Perubahan-perubahan ini bisa saja disebabkan oleh pengaruh pamas yang semakin hari semakin meningkat pengaruhnya, baik ditingkatkan legislatif maupun eksekutif. berangkat dari paparan data diatas menarik untuk dikaji bagaimana dinamika dan pengaruh partai politik nasional dan partai politik lokal pada pilkada 2017.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih bermakna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar sajian angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan deskriptif kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Peneliti berusaha menganalisis data dengan semua kekayaan wataknya yang penuh nuansa, sedekat mungkin dengan bentuk aslinya seperti pada waktu dicatat (Sutopo, 2002: 40).

### Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lakukan di Provinsi Aceh, Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive random sampling* dengan memilih beberapa informan yang merasa lebih tau mengenai masalah penelitian (Sugioyono, 2011: 85). Dalam penelitian kualitatif

cenderung menggunakan teknik cupiklan yang bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan konsep teoritis yang digunakan, keingintauan pribadi peneliti, karakteristik empiris dan lain-lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Partai Politik Dalam Dinamika**

Partai politik dalam akan mudah dipahami dengan melihat beberapa definisi para ahli terkait dengan partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi (Ramlan Surakti, 1992: 113).

Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Miriam Budiardjo, 2008: 403).

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara bottom up maupun

top down.

### **Pemilukada**

Dalam kehidupan pemilukada akhir-akhir ini, tampak adanya perseteruan dan persaingan yang tidak sehat, termasuk dalam pelaksanaan pilkada gubernur, bupati maupun walikota. Kebanyakan dalam proses pilkada tersebut terjadi ketidakpuasan pihak-pihak yang berkompetisi, karena adanya persaingan yang tidak sehat. Hal ini dapat mengakibatkan tercorengnya kemurnian demokrasi politik yang terbangun dari nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Hiruk pikuk dan segala macam hingar bingar yang terjadi dalam proses demokrasi politik tersebut setidaknya telah menyedot perhatian masyarakat sehingga berdampak negative dalam keikutsertaan anggota masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Bahkan praktek-praktek politik yang bernuansa-politik transaksional, sudah dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar oleh sebagian elite politik. Padahal masalah tersebut secara hakiki dapat merusak tatanan nilai demokrasi politik yang sesungguhnya. Karena sebagai musuh bersama, maka siapapun pelakunya harus diperangi secara bersama-sama pula dalam rangka mewujudkan politik local yang sehat (Sudirman 741; 2012). Karena itu, dalam pemilukada perkembangan demokrasi ditandai oleh 3 (tiga) prasyarat yaitu pertama, kompetisi didalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan; kedua, partisipasi masyarakat; ketiga, adanya jaminan hak-hak sipil dalam politik (Marijan, 2010;83). Sehingga ruang pemilu dimana sebuah nilai demokrasi tersebut hadir, akan melahirkan atmosfir demokrasi dan terwujud secara kongkrit pada kehidupan

kemasyarakatan dan dirasakan oleh siapa saja yang melihat dan terlibat didalamnya. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan kebijaksanaan umum (public policy).

### **Politik Menjelang Pemilu**

Pada tahun 2017, Provinsi Aceh menyelenggarakan pemilu serentak dengan memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota di dua puluh Kabupaten Kota di Aceh, yaitu Aceh Timur, Pidie, Aceh Utara, Aceh Singkil, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Simeulue, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Besar, Bireun, Sabang, Banda Aceh, Bener Meriah, Gayo Lues, Lhokseumawe, serta Aceh Tengah. Pemilu tahun ini diikuti pasangan kandidat lama mantan Gubernur Aceh seperti Irwandi Yusuf, M. Sc (mantan Gubernur Aceh) berpasangan dengan Ir. Nova Iriansyah, H. Muzakkira Manaf (Wakil Gubernur Aceh) berpasangan dengan T. A. Khalid, MM, Dr. Ir. Tarmizi Karim, M. Sc (Mantan Pj, Gubernur Aceh) berpasangan dengan T. Machsalmina Ali, MM, Ir. Abdullah Puteh (mantan Gubernur Aceh) berpasangan dengan Sayed Mustafa Usab Al Idroes, M. Si, Dr. Zaini Abdullah (Gubernur/incumbent) berpasangan dengan Ir. Nasruddin, MM, dan Tgk. Zakaria Saman/ T (mantan Menhan GAM) berpasangan dengan T. Alaidin Syah, M. Eng. Pasangan Zakaria Zaman dan T. Alaidin Syah /Zakat sebagai satu-satunya kandidat baru yang maju lewat jalur independen.

Kehadiran Zakaria Saman dan T. Alaidin Syah (disingkat Zakat) dalam bursa pencalonan Gubernur Aceh periode 2017- 2022 membuat suasana publik di Aceh semakin menarik karena pasangan tersebut sering melontarkan kata-kata guyonan dan kontroversinya di media massa.

### **Dinamika Politik Pasca Perdamaian**

Sejak masa damai berlansung, kondisi politik di Aceh mengalami perubahan signifikan, dimana perjuangan politik tidak lagi dilakukan melalui gerakan senjata akan tetapi dilakukan melalui aktifitas politik dengan menempatkan orang-orangnya di lembaga eksekutif dan legislatif. Maka itu, elit politik yang sebelumnya bergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka atau gerakan sipil pasca perdamaian berlomba-lomba mendirikan partai politik lokal, seperti Partai Aceh (PA), Partai Naggroe Aceh (PNA), Partai Daulat Aceh (PDA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) dan lainnya. Dengan banyaknya partai lokal sehingga membuat dinamika politik di Aceh semakin tajam, dimana masing-masing partai saling merebut pengaruh.

Sebagai daerah bekas konflik, setiap pemilu aksi teror dan intimidasi sering terjadi kala itu, semisal pada pemilu tahun 2014, di Aceh Utara, terjadinya penembakan terhadap salah seorang calon anggota legislatif PNA, dan pembakaran posko Partai Nasdem dan PNA di Alue Awe, Geuredong Pase, Aceh Utara, pagi tadi (Serambi Indonesia, 5 Maret 2014).

Dari berbagai dinamika politik yang terjadi pasca perdamaian kala itu, ternyata belum bisa mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam hal, partisipasi politik baik memilih maupun

dipilih. Namun rasa aman itu ada dalam tubuh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang direpresentasikan sebagai partai Aceh, maka kala itu, siapa saja yang menantang atau mencoba bersaing dengan partai tersebut baik sebelum maupun sesudah pemilu berlangsung ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi pihak yang bersangkutan.

Selain itu keadaan pasca konflik dengan dinamika yang terjadi di Aceh seolah mempersempit bahkan menghambat tumbuhnya demokrasi secara baik. Tidak hanya itu, sebagai akibat dari ancaman yang terjadi kala itu juga memberikan dampak pada ruang gerak politik nasional untuk menjejaki politik Aceh, tentunya hal ini menjadi landasan bahwa partai politik nasional kala itu belum siap bersaing secara signifikan dalam pemilu di untuk memperebutkan tampuk kepemimpinan Aceh kala itu.

### **Hubungan Partai Lokal Dengan Partai Nasional**

Megenai partai-partai politik nasional ditingkatkan lokal pada saat ini berdasarkan amanatan peneliti lebih mengurus kepentingan golongannya sendiri dan melakukan manuver politik antar partai hanya untuk jabatan dan pendapatan. Padahal menurut Mochtar Pabottingi tiap partai politik haruslah benar-benar partai politik dengan konstituen nyata dalam kontinum aspirasi politik yang memang hidup atau masih hidup dalam nasion, bukan hanya sekedar pengatasnamaan yang menipu rakyat. Dengan demikian, partai-partai politik seolah tidak berakar, tidak punya garis dan konsistensi politik tersendiri, dan tidak independen seperti yang dibentuk dan

dibiayai oleh kelompok Cendana jelas tak bisa dikategorikan sebagai partai politik dalam kalkulasi demokrasi. (Mochtar Pabottingi, 2007; XXXV).

Pada kenyataannya partai politik baik nasional ditingkat lokal tidak mencerminkan aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa sistem representasi politik yang sedang berlangsung bersifat asimetris. Representasi politik sedang diterpa krisis dan ketidakseimbangan kepentingan. Partai politik nasional tidak menimbang-nimbang semua kebutuhan konstituennya ditingkat lokal. Partai politik nasional lebih berat sebelah pada kepentingan elit pusat dari pada kebutuhan masyarakat lokal.

Dilain sisi adanya partai lokal diharapkan bisa menjadi sebuah jawaban akan kebuntuan aspirasi masyarakat yang tidak kunjung terjawab secara koprehensif oleh pemerintah pusat, sayangnya ini juga tidak menjadi skala prioritas para elit politik lokal apalagi nasional, dimana kebanyakan dari para elit hanya menggunakan partai politik sebagai sarana untuk menerjemahkan kepentingan mereka sendiri bahkan tidak sensitif terhadap aspirasi masyarakat. Namun saat mendekati pemilukada barulah kaum elit politik ini bicara soal rakyat seolah ingin menampung aspirasi walhasil rakyat terus terbodohi dengan gombalan retorika untuk menerjemahkan kepentingan politiknya.

Kemudian pendirian dan keberadaan partai lokal juga memiliki kendala tersendiri yang disebabkan oleh ketidak mampuan elit lokal untuk mengontrol dan mengelola perlok dengan baik berpotensi memunculkan oligarki baru ditingkat lokal atau rentan dibajak oleh kekuatan oligarki di pusat bahkan berujung pada perpecahan. Sebagai

contoh konflik internal partai Aceh saat Musyawarah Partai Aceh Bansigoem Aceh 2016, di Hotel Grand Aceh, Minggu (10/04/16) lalu. Akibatnya, suatu keuntungan bagi parnas untuk masuk dalam ranah politik Aceh.

Dengan demikian, jika berbicara tentang hubungan antara partai lokal dan nasional di Aceh tentunya kita harus membagi dua fase dimana dulunya partai lokal bersaing ketat dengan partai nasional memperebutkan kursi kepemimpinan dan bahkan sangat dipercaya dikalangan masyarakat Aceh sehingga berhasil mencoret eksistensi parnas dalam ranah perpolitikan lokal, namun sayangnya kini berbanding terbalik dimana hubungan parlok dan parnas semakin harmonis atas nama kepentingan masing-masing partai, maka sudah lumrah terjadi apabila partai lokal kini mulai berkualitas dengan partai nasional hal ini dapat terbukti ketika mencermati pesta demokrasi 2017 lalu.

Seperti Menurut Musriadi yang merupakan salah seorang politisi partai amanat nasional kota Banda Aceh mengatakan bahwa hubungan partai lokal dengan partai nasional cair sekali. Inikan konteksnya politik maka semua kemungkinan akan terjadi baik berkoalisi maupun tidak berkoalisi. Sehingga dinamika ini akan berjalan sesuai dengan perkembangan kepentingan partai baik parlok maupun parnas.

### **Konflik Elit Internal Partai**

Pascakonflik vertikal Aceh-Pusat malah menimbulkan konflik baru secara horizontal. Dimulai pada Pilkada Aceh tahun 2006, selain terpilih Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar representasi GAM/Komite Paeralihan Aceh (KPA)

dan SIRA, melalui jalur perseorangan (independen) menjadi awal keretakan elite GAM/KPA. Berlanjut pasca terbentuk partai lokal (parlok) GAM/KPA, yaitu Partai Aceh (PA). Di mana pada Pemilu 2009 demi pragmatisme kekuasaan berkonflik dengan sayap politiknya, civil society, seperti SIRA dan SMUR, karena pembentukan parlok SIRA dan PRA. Padahal, di era konflik saling mendukung melawan rezim otoriter Pusat.

Hingga kini, konflik internal GAM/KPA/PA juga semakin terbuka, dalam hal ini kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah Partai Aceh Bansigoem Aceh 2016, di Hotel Grand Aceh, Minggu (10/04/16) lalu, apapun penyebabnya jelas bukan merupakan pelajaran politik yang kurang baik. Karena, Pertama, Partai Aceh adalah partai yang paling berkuasa di Aceh sekarang ini, karena dalam Pilkada 2007 dan Pilkada 2012 telah diberikan amanah oleh rakyat Aceh untuk memimpin provinsi “Serambi Mekkah”, sehingga mereka menempatkan banyak kadernya sebagai kepala daerah dan duduk di DPR Aceh baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jadi, seharusnya Partai Aceh sudah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam internal partainya. Faktanya, kericuhan jelas menggambarkan Partai Aceh belum memiliki mekanisme resolusi konflik tersebut.

Konsekuensinya, perpecahan GAM/KPA/PA ini telah menjadi momok. Dapat dilihat menjelang Pilkada Aceh 2017, ketika para Tuha Peut PA, seperti Doto dan Zakaria Saman (Apa Karya) yang ikut mencalonkan diri sebagai gubernur, meskipun bukan melalui “kendaraan” PA. Sedangkan,



Muallem diusung melalui PA. Setali tiga uang dengan Irwandi yang mencalonkan diri melalui calon independen, karena polemik di internal PNA. Apalagi, berdasarkan Pasal 91 ayat (2) UUPA, PNA tidak memenuhi syarat mengajukan calon karena tidak memperoleh minimal 15% jumlah kursi DPRA. Realitas ini menjadikan “organisasi penguasa” dan kesejahteraan rakyat semakin mengkhawatirkan.

Karena itu, logika yang paling realistis akan dinamika perkembangan perpolitikan Aceh saat ini adalah semakin terbukanya peluang parnas untuk melakukan kolaborasi dengan partai lokal. Atau bisa juga parnas bersatu mengusung calonnya sendiri, karena eksistensi dan akuntabilitas partai lokal yang kian merosot sehingga semakin menunjukkan bangkitnya parnas dalam ranah perpolitikan di Aceh. Selain itu realitas penguasa di Aceh juga cenderung hanya menggunakan sikap pragmatic paradigma. Kepentingan hanya untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan, bukan mempertanggungjawabkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara, yang belum berkuasa akan merebut kekuasaan, bahkan dengan “membelah” Aceh sekalipun, seperti isu pemekaran ALA-ABAS. Sementara kesejahteraan rakyat hanya menjadi stereotype para elite.

Namun menurut pandangan peneliti, sayangnya elite Aceh, niscaya menanggalkan pragmatisme semata. Tetapi, menggunakan opsi mixed (campuran grounded dan pragmatic). Siapapun dapat merebut kekuasaan untuk menjadi gubernur, bupati, dan walikota pada Pilkada. Namun, dalam membangun Aceh niscaya berdasarkan fondasi kebijakan (policy) dari nilai-nilai dan asas-asas keislaman, moral MoU

Helsinki, dan kesepakatan seluruh komponen rakyat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dinamika politik di Aceh pasca perdamaian mengalami perubahan jika dibandingkan dengan kondisi Aceh sebelum MoU Helsinki. Jika pada masa sebelumnya, kondisi Aceh mengalami konflik berkepanjangan dengan munculnya Gerakan pemberontakan GAM selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Sejak masa damai berlansung, kondisi politik di Aceh mengalami perubahan signifikan, dimana perjuangan politik tidak lagi dilakukan melalui gerakan senjata akan tetapi dilakukan melalui aktifitas politik dengan menempatkan orang-orangnya di lembaga eksekutif dan legislatif. Maka itu, elit politik pasca perdamaian berlomba-lomba mendirikan partai politik lokal. Dengan banyaknya partai lokal membuat dinamika politik di Aceh semakin tajam. Dilain sisi elit pusat juga cenderung ingin memegang tampuk kepemimpinan Aceh untuk memperkuat mesin politiknya ditingkat nasional. Maka mualailah terbentuk perselisihan baru antara elit pusat dan daerah yaitu persaiangan politik antara partai lokal dan nasional. Meskipun demikian yang perlu kita garis bawahi dalam dinamika perseteruan antara partai lokal dan nasional di Aceh adalah perseteruan secara horizontal antara elit di masing-masing kubu dan ini cenderung pada lapisan bawah kepengurusan partai. Dengan demikian, jika berbicara tentang dinamika antara partai lokal dan nasional di Aceh tentunya kita harus membagi dua fase dimana dulunya (Sebelum pilkada 2017) partai lokal

bersaing ketat dengan partai nasional memperebutkan kursi kepemimpinan dan bahkan sangat dipercaya dikalangan masyarakat Aceh sehingga berhasil mencoret eksistensi parnas dalam ranah perpolitikan lokal, namun sayangnya kini berbanding terbalik dimana hubungan parlok dan parnas semakin harmonis atas nama kepentingan masing-masing partai.

Karena itu, logika yang paling realistis akan dinamika perkembangan perpolitikan Aceh saat ini adalah semakin terbukanya peluang parnas untuk melakukan kolaborasi dengan partai lokal. Atau bisa juga parnas bersatu mengusung calonnya sendiri, karena eksistensi dan akuntabilitas partai lokal yang kian merosot sebagai akibat dari pepecahan elit sehingga semakin menunjukkan bangkitnya parnas dalam ranah perpolitikan di Aceh. Pada akhirnya dinamika politik Aceh terkini menuai pengaruh yang cukup signifikan terhadap hasil kolaborasi partai lokal dengan partai nasional hal ini dapat terbukti ketika mencermati pesta demokrasi 2017 lalu. Sebagai kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika perkembangan politik antara parlok dan parnas memiliki dinamika yang cukup dinamis. Dinamika ini sangat dipengaruhi oleh hal yang mendasar dalam politik yaitu kepentingan. Antara parlok dan parnas ditingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional memiliki kepentingan yang berbeda. Disisi lain dinamika antara parlok dan parnas ada pada tatanan ideologi kepartaian.

#### DAFTAR PUSTAKA

Budiardji, Meriam. (2008). *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mochtar Pabotitingi. (2007). *Pengantar Untuk Partai & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2007, XXXV.

Sudirman. (2012). *Dinamika politik lokal dalam Social capital (modal sosial)*. Academika Untat.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R @ D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.

Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapan Dalam Penelitian*. Surakarta: NS Press.

---

#### ▪ How to cite this paper :

Nur, M., Usman, U., & Safwadi, I. (2018). Dinamika Politik Partai Lokal dan Nasional Pada Pemilu di Aceh, Tahun 2017. *Jurnal Humaniora*, 2(2), 140-149.